



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

fs

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

f 5

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.783.759.843.834,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.92.110.528.556,00 (*sembilan puluh dua milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.070.692.210,00 (*tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.609.269.920,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

85

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.482.031.608,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.948.534.818,00 (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.37.070.692.210,00 (*tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.942.545.931,00 (*sembilan milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.433.694.475,00 (*enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 612.767.023,00 (*enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.800.191.430,00 (*lima milyar delapan ratus juta seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh rupiah*);

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 292.088.535,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 66.977.531,00 (*enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus juta rupiah*);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.222.427.285,00 (*sepuluh milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 25.609.269.920,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.025.992.500 ,00 (*enam milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.051.277.420 00 (*sembilan belas milyar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 532.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua juta rupiah*);

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 5.482.031.608 ,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga puluh satu ribu enam ratus*

25

delapan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.482.031.608 ,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.23.948.534.818,00 (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 114.186.000 ,00 (*seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.625.000.000 ,00 (*lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000 ,00 (*empat milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 ,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 592.236.532.590 ,00 (*lima ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 562.370.143.182 ,00 (*lima ratus enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.562.370.143.182,00 (*lima ratus enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Perimbangan; dan
 - Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.516.838.587.182,00 (*lima ratus enam belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.531.556.000,00 (*empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.866.389.408 ,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 13

- Anggaran belanja tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.783.759.843.834,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja Tidak Terduga;

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.642.962.609.606,00 (*enam ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan ribu enam ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.322.664.639.155,00 (*tiga ratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.295.562.732.925,00 (*dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.655.237.526 ,00 (*dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.322.664.639.155,00 (*tiga ratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.178.510.321.251,00 (*seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.747.007.187,00 (*delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.638.108.197,00 (*empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.810.175.094,00 (*sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.490.820.446,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.178.510.321.251,00 (*seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.872.129.069,00 (*seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah*).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.887.032.418,00 (*dua belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.930.000.405,00 (*lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus lima rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.898.012.610,00 (*lima milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.044.157.711,00 (*tiga milyar empat puluh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.869.604.894,00 (*tujuh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.679.031,00 (*tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.121.935,00 (*dua juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.547.951.724,00 (*delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.293.437.001,00 (*dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu satu rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.865.194.453,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.85.747.007.187,00 (*delapan puluh*

lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.824.462.356,00 (*empat puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.567.948.367,00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.301.596.464,00 (*empat puluh empat milyar tiga ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.41.638.108.197,00 (*empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.050.393.168,00 (*satu milyar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.568.605.829,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).

- (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.11.810.175.094,00 (*sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.375.000,00 (*lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000,00 (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.787.500.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.700.094,00 (*tujuh ratus ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.466.600.000,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.600.000.000,00 (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 1.490.820.446,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.200.000,00 (*delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.624,00 (*dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.588.080,00 (*enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.134.316,00 (*seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.402.948,00 (*empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.765.458.502,00 (*tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah*).
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.544.731.976,00 (*lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.295.562.732.925,00 (*dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.870.029.927,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.141.427.495.208,00 (*seratus empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.653.863.867,00 (*dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.803.639.673,00 (*empat puluh dua milyar delapan*

ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.758.900.000,00 (*dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.53.870.029.927,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.701.119.927,00 (*lima puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.168.910.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.141.427.495.208,00 (*seratus empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.127.073.725.332,00 (*seratus dua puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.831.237.482,00 (*lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.122.500.000,00 (*seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.532.515.000,00 (*satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.587.600.000,00 (*dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.805.260.000,00 (*delapan ratus lima ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.582.433.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.164.000.000,00 (*seratus enam puluh empat juta rupiah*).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.216.586.000,00 (*satu milyar dua ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.21.653.863.867,00 (*dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;

- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.530.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.391.927.012,00 (*empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua belas rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.851.574.220,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.932.332.635,00 (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.455.500.000,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.42.803.639.673,00 (*empat puluh dua milyar delapan tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.268.639.673,00 (*empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.535.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.2.758.900.000,00 (*dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.159.900.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.599.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.23.655.237.526,00 (*dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.355.379.000,00 (*tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.564.211.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.22.564.211.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang - undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.861.740.500,00 (*enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.487.470.500,00 (*lima belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu lima rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

85

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.123.125.748.792,00 (*seratus dua tiga milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.999.944.467,00 (*empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.277.125.124,00 (*dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.886.820.001,00 (*empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu satu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.961.859.200,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yakni Belanja Modal Tanah Persil;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.49.999.944.467,00 (*empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.520.700.000,00 (*lima ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.001.727.000,00 (*enam milyar satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.338.111.320,00 (*tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.011.771.810,00 (*sebelas milyar seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.624.788.000,00 (*satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.235.660.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.385.038.625,00 (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.546.952.700,00 (*enam milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.98.857.500,00 (*sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.016.000.000,00 (*empat milyar enam belas juta rupiah*).
- (14) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.271.350.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.4.086.445.997,00 (*empat milyar delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.11.757.291.515,00 (*sebelas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.29.277.125.124,00 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.476.691.124,00 (*dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.500.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.657.934.000,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.40.886.820.001,00 (*empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu satu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.658.209.413,00 (*dua belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah*).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.070.012.277,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh puluh juta dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.881.413.311,00 (*empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.277.185.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.2.961.859.200,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Hewan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.441.000.000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.878.720.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 41

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.671.485.436,00 (*tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 42

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.99.412.782.688,00 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 43

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp.99.412.782.688,00 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.386.026.235,00 (*sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.99.386.026.235,00 (*sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.412.782.688,00 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 46

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(99.412.782.688,00) (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.99.412.782.688,00 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 48

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

45

Pasal 49

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada

45

tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 50

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

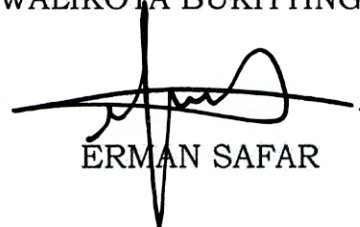
Pasal 51

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
Pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR...35

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.115.624.892	92.110.528.556	(42.005.096.336)	31 %
4.1.01	Pajak Daerah	40.707.014.656	37.070.692.210	(3.636.322.446)	9 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	12.147.683.256	9.942.545.931	(2.205.137.325)	18 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	12.141.037.943	9.939.245.931	(2.201.792.012)	18 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	12.141.037.943	9.939.245.931	(2.201.792.012)	18 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	6.645.313	3.300.000	(3.345.313)	50 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	6.645.313	3.300.000	(3.345.313)	50 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.636.661.036	6.433.694.475	797.033.439	14 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.332.186.156	5.807.219.575	475.033.419	9 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.332.186.156	5.807.219.575	475.033.419	9 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	180.899.250	300.899.250	120.000.000	66 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	180.899.250	300.899.250	120.000.000	66 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	123.575.630	325.575.650	202.000.020	163 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	123.575.630	325.575.650	202.000.020	163 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	872.767.023	612.767.023	(260.000.000)	30 %
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	14.625.000	14.625.000	0	0 %
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	14.625.000	14.625.000	0	0 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	4.887.958	4.887.958	0	0 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	4.887.958	4.887.958	0	0 %
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	16.498.710	16.498.710	0	0 %
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	16.498.710	16.498.710	0	0 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	821.745.294	561.745.294	(260.000.000)	32 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	821.745.294	561.745.294	(260.000.000)	32 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.010.061	15.010.061	0	0 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.010.061	15.010.061	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.109.901.387	500.000.000	(609.901.387)	55 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.016.025.750	406.124.363	(609.901.387)	60 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.016.025.750	406.124.363	(609.901.387)	60 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	67.491.512	67.491.512	0	0 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	67.491.512	67.491.512	0	0 %
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	26.384.125	26.384.125	0	0 %
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	26.384.125	26.384.125	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.288.512.584	5.800.191.430	511.678.846	10 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.288.512.584	5.800.191.430	511.678.846	10 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.288.512.584	5.800.191.430	511.678.846	10 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	432.088.535	292.088.535	(140.000.000)	32 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	432.088.535	292.088.535	(140.000.000)	32 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	432.088.535	292.088.535	(140.000.000)	32 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	86.977.531	66.977.531	(20.000.000)	23 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	86.977.531	66.977.531	(20.000.000)	23 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	86.977.531	66.977.531	(20.000.000)	23 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.606.028.547	3.200.000.000	(406.028.547)	11 %

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.15.01	PBBP2	3.606.028.547	3.200.000.000	(406.028.547)	11 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.606.028.547	3.200.000.000	(406.028.547)	11 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.526.394.757	10.222.427.285	(1.303.967.472)	11 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	11.526.394.757	10.222.427.285	(1.303.967.472)	11 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	11.526.394.757	10.222.427.285	(1.303.967.472)	11 %
4.1.02	Retribusi Daerah	28.656.743.070	25.609.269.920	(3.047.473.150)	11 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.410.371.479	6.025.992.500	615.621.021	11 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	320.000.000	400.000.000	80.000.000	25 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	115.451.000	115.451.000	0	0 %
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	204.549.000	284.549.000	80.000.000	39 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.334.860.611	1.489.058.500	154.197.889	12 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.334.860.611	1.489.058.500	154.197.889	12 %
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	1.274.934.000	(225.066.000)	15 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	1.274.934.000	(225.066.000)	15 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	730.008.483	975.000.000	244.991.517	34 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	357.502.883	700.000.000	342.497.117	96 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	313.369.600	250.000.000	(63.369.600)	20 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	59.136.000	25.000.000	(34.136.000)	58 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	213.678.800	0	(213.678.800)	100 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	213.678.800	0	(213.678.800)	100 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.124.823.585	1.700.000.000	575.176.415	51 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.124.823.585	1.700.000.000	575.176.415	51 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	172.000.000	172.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	172.000.000	172.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	22.710.371.591	19.051.277.420	(3.659.094.171)	16 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	397.568.600	190.000.000	(207.568.600)	52 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	317.160.000	120.000.000	(197.160.000)	62 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	80.408.600	70.000.000	(10.408.600)	13 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.825.755.352	2.455.587.420	(370.167.932)	13 %
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	2.242.113.752	1.871.945.820	(370.167.932)	17 %
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	583.641.600	583.641.600	0	0 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	244.818.750	191.656.000	(53.162.750)	22 %
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	244.818.750	191.656.000	(53.162.750)	22 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.714.278.889	1.982.034.000	(1.732.244.889)	47 %
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	3.714.278.889	1.982.034.000	(1.732.244.889)	47 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000	216.000.000	36.000.000	20 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	180.000.000	216.000.000	36.000.000	20 %

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.318.850.000	13.950.000.000	(1.368.850.000)	9 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.318.850.000	13.950.000.000	(1.368.850.000)	9 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	29.100.000	66.000.000	36.900.000	127 %
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	22.500.000	43.000.000	20.500.000	91 %
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	6.600.000	23.000.000	16.400.000	248 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	536.000.000	532.000.000	(4.000.000)	1 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	36.000.000	32.000.000	(4.000.000)	11 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	36.000.000	32.000.000	(4.000.000)	11 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.795.000.000	5.482.031.608	(312.968.392)	5 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.795.000.000	5.482.031.608	(312.968.392)	5 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.795.000.000	5.482.031.608	(312.968.392)	5 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.795.000.000	5.482.031.608	(312.968.392)	5 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.956.867.166	23.948.534.818	(35.008.332.348)	59 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000	114.186.000	(100.000.000)	47 %
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	214.186.000	114.186.000	(100.000.000)	47 %
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	214.186.000	114.186.000	(100.000.000)	47 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.814.500.000	5.625.000.000	(15.189.500.000)	73 %
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.064.500.000	4.825.000.000	(15.239.500.000)	76 %
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.064.500.000	4.825.000.000	(15.239.500.000)	76 %
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	750.000.000	800.000.000	50.000.000	7 %
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	750.000.000	800.000.000	50.000.000	7 %
4.1.04.05	Jasa Giro	3.900.000.000	3.300.000.000	(600.000.000)	15 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.900.000.000	3.300.000.000	(600.000.000)	15 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.900.000.000	3.300.000.000	(600.000.000)	15 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000	4.000.000.000	(1.000.000.000)	20 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000	4.000.000.000	(1.000.000.000)	20 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000	4.000.000.000	(1.000.000.000)	20 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	50 %
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	50 %
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	50 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	50 %
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	50 %
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	50 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	50 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	50 %
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.099.078	0	(7.099.078)	100 %
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0	0	0	0 %

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0	0 %
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0	0	0	0 %
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	7.099.078	0	(7.099.078)	100 %
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.099.078	0	(7.099.078)	100 %
4.1.04.13.02.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0	0	0	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	238.528	0	(238.528)	100 %
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	238.528	0	(238.528)	100 %
4.1.04.15.07.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	238.528	0	(238.528)	100 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	28.950.843.560	10.859.348.818	(18.091.494.742)	62 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	28.950.843.560	10.859.348.818	(18.091.494.742)	62 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	28.950.843.560	10.859.348.818	(18.091.494.742)	62 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	583.196.715.875	592.236.532.590	9.039.816.715	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	560.311.277.875	562.370.143.182	2.058.865.307	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	514.779.721.875	516.838.587.182	2.058.865.307	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.532.530.000	14.798.713.382	2.266.183.382	18 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.309.407.000	5.236.565.753	1.927.158.753	58 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0	175.820.338	175.820.338	100 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.842.612.000	7.156.598.072	313.986.072	5 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	53.939.273	53.939.273	100 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0	-27.504.000	(27.504.000)	100 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	435.017.000	617.991.107	182.974.107	42 %
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	560.385.000	0	(560.385.000)	100 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0	400.516.880	400.516.880	100 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0	214.160.979	214.160.979	100 %
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	256.790.000	0	(256.790.000)	100 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000	970.624.980	(157.694.020)	14 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	435.274.988.000	421.334.282.000	(13.940.706.000)	3 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	435.274.988.000	421.334.282.000	(13.940.706.000)	3 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.400.107.075	21.199.145.000	(1.200.962.075)	5 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.591.832.000	2.591.832.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.979.428.000	2.979.428.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.651.505.425	1.651.506.000	575	0 %
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	750.647.650	750.648.000	350	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3.118.610.000	288.347.000	(2.830.263.000)	91 %
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengusahan	179.501.000	179.501.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.690.293.000	7.489.330.000	(1.200.963.000)	14 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	477.750.000	0	(477.750.000)	100 %
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.960.540.000	1.960.540.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0	2.830.263.000	2.830.263.000	100 %
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0	477.750.000	477.750.000	100 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	44.572.096.800	59.506.446.800	14.934.350.000	34 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0	14.754.350.000	14.754.350.000	100 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0	180.000.000	180.000.000	100 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.109.056.000	31.109.056.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	237.000.000	237.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.236.200.000	2.236.200.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	652.867.800	652.867.800	0	0 %
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.262.887.000	4.262.887.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000	505.783.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	192.550.000	192.550.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	240.953.000	240.953.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.300.540.000	943.495.000	(357.045.000)	27 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.206.426.000	390.304.000	(816.122.000)	68 %
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	565.256.000	565.256.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000	862.578.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0	326.122.000	326.122.000	100 %
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	357.045.000	357.045.000	100 %
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0	490.000.000	490.000.000	100 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	45.531.556.000	45.531.556.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	45.531.556.000	45.531.556.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	45.531.556.000	45.531.556.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.885.438.000	29.866.389.408	6.980.951.408	31 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.885.438.000	29.866.389.408	6.980.951.408	31 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.885.438.000	29.866.389.408	6.980.951.408	31 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.220.469.000	7.313.712.249	2.093.243.249	40 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.993.429.000	2.883.464.365	(109.964.635)	4 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.307.415.000	9.897.564.638	2.590.149.638	35 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	82.363.000	86.787.692	4.424.692	5 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.281.762.000	9.684.860.464	2.403.098.464	33 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.820.500.000	0	(14.820.500.000)	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.820.500.000	0	(14.820.500.000)	100 %
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	14.820.500.000	0	(14.820.500.000)	100 %
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	14.820.500.000	0	(14.820.500.000)	100 %
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	14.820.500.000	0	(14.820.500.000)	100 %
	Jumlah Pendapatan	732.132.840.767	684.347.061.146	(47.785.779.621)	7 %
5	BELANJA				

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI	630.374.863.970	642.962.609.606	12.587.745.636	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	332.361.032.214	322.664.639.155	(9.696.393.059)	3 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	179.940.719.381	178.510.321.251	(1.430.398.130)	1 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	135.070.252.547	132.872.129.069	(2.198.123.478)	2 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	135.070.252.547	132.806.314.669	(2.263.937.878)	2 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	65.814.400	65.814.400	100 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.907.988.627	12.887.032.418	(20.956.209)	0 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.907.988.627	12.877.032.418	(30.956.209)	0 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.098.866.750	5.930.000.405	(168.866.345)	3 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.098.866.750	5.930.000.405	(168.866.345)	3 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.764.777.650	5.898.012.610	133.234.960	2 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.764.777.650	5.890.132.610	125.354.960	2 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	7.880.000	7.880.000	100 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.035.168.500	3.044.157.711	8.989.211	0 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.035.168.500	3.039.837.711	4.669.211	0 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0	4.320.000	4.320.000	100 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.849.722.316	7.869.604.894	1.019.882.578	15 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.849.722.316	7.862.390.654	1.012.668.338	15 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	7.214.240	7.214.240	100 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	336.222.024	300.679.031	(35.542.993)	11 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	336.222.024	300.679.031	(35.542.993)	11 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.111.505	2.121.935	10.430	0 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.111.505	2.115.327	3.822	0 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6.608	6.608	100 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.762.345.834	8.547.951.724	(214.394.110)	2 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.762.345.834	8.543.278.436	(219.067.398)	3 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0	4.673.288	4.673.288	100 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	278.581.777	293.437.001	14.855.224	5 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	278.581.777	292.303.057	13.721.280	5 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0	1.133.944	1.133.944	100 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	834.681.851	865.194.453	30.512.602	4 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	834.681.851	863.792.597	29.110.746	3 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0	1.401.856	1.401.856	100 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	92.985.594.077	85.747.007.187	(7.238.586.890)	8 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.087.100.505	40.824.462.356	(12.262.638.149)	23 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.087.100.505	40.792.462.356	(12.294.638.149)	23 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0	32.000.000	32.000.000	100 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.761.045.000	567.948.367	(1.193.096.633)	68 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.761.045.000	567.948.367	(1.193.096.633)	68 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	178.481.530	0	(178.481.530)	100 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	178.481.530	0	(178.481.530)	100 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	37.958.967.042	44.354.596.464	6.395.629.422	17 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	37.958.967.042	44.301.596.464	6.342.629.422	17 %
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0	53.000.000	53.000.000	100 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.616.580.559	41.638.108.197	(978.472.362)	2 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.440.173.102	1.050.393.168	(389.779.934)	27 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	467.019.928	303.692.081	(163.327.847)	35 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	206.531.350	160.842.361	(45.688.989)	22 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	31.978.817	21.819.175	(10.159.642)	32 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	40.667.592	27.747.534	(12.920.058)	32 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	175.454.576	145.004.785	(30.449.791)	17 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	15.832.037	10.802.213	(5.029.824)	32 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.186.920	2.174.438	(1.012.482)	32 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	132.127.503	90.150.713	(41.976.790)	32 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	367.374.379	288.159.868	(79.214.511)	22 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	814.061.457	568.605.829	(245.455.628)	30 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	24.250.000	24.250.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	35.438.294	30.799.015	(4.639.279)	13 %
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	250.000	250.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	51.135.000	51.135.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	21.081.258	18.529.968	(2.551.290)	12 %
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	9.058.189	9.058.189	0	0 %
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	31.418.629	31.276.426	(142.203)	0 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	422.500	275.875	(146.625)	35 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.667.000	6.667.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.020.430	4.020.430	0	0 %
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	73.110.768	41.932.470	(31.178.298)	43 %
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	9.535.690	9.535.690	0	0 %
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	108.613.103	90.372.766	(18.240.337)	17 %
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	10.455.000	10.455.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	402.057.596	213.500.000	(188.557.596)	47 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.548.000	1.548.000	0	0 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	31.109.056.000	31.109.056.000	0	0 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	31.109.056.000	31.109.056.000	0	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	237.000.000	237.000.000	0	0 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	237.000.000	237.000.000	0	0 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	0	0 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	0	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.972.540.000	7.606.003.200	(366.536.800)	5 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.065.815.000	6.043.303.200	(22.511.800)	0 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.785.425.000	1.462.300.000	(323.125.000)	18 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	121.300.000	100.400.000	(20.900.000)	17 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.043.750.000	1.067.050.000	23.300.000	2 %
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.043.750.000	1.067.050.000	23.300.000	2 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.810.175.094	11.810.175.094	0	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	580.000.000	580.000.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	580.000.000	580.000.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.000.000	840.000.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.000.000	840.000.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.375.000	15.375.000	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.375.000	15.375.000	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000	3.150.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000	3.150.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	787.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	787.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.094	700.094	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.094	700.094	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.466.600.000	2.466.600.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.800.000	1.800.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.800.000	4.800.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	744.701.003	1.490.820.446	746.119.443	100 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000	55.965.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000	55.965.000	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000	8.000.000	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000	8.000.000	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000	100.737.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000	100.737.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.624	2.624	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.624	2.624	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.588.080	6.588.080	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.588.080	6.588.080	0	0 %
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316	134.316	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316	134.316	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948	402.948	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948	402.948	0	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	299.979.363	765.458.502	465.479.139	155 %
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	94.144.545	218.658.298	124.513.753	132 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	43.684.123	120.631.771	76.947.648	176 %
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.763.944	15.709.806	8.945.862	132 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.601.736	19.978.225	11.376.489	132 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	37.110.973	108.753.589	71.642.616	193 %
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	3.348.686	7.777.594	4.428.908	132 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	674.076	1.565.596	891.520	132 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.946.721	64.908.514	36.961.793	132 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	77.704.559	207.475.109	129.770.550	167 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	264.091.672	544.731.976	280.640.304	106 %
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.671.309	17.814.750	11.143.441	167 %
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.500.000	10.500.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	25.031.088	21.852.188	(3.178.900)	13 %
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.495.751	1.495.751	0	0 %
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.717.383	38.101.250	29.383.867	337 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.500	224.125	146.625	189 %
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.333.000	1.333.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0	1.000.000	1.000.000	100 %
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	21.899.604	55.035.853	33.136.249	151 %
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.713.731	1.713.731	0	0 %
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	26.899.953	34.409.328	7.509.375	28 %
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	159.500.353	350.000.000	190.499.647	119 %
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0	11.000.000	11.000.000	100 %
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	252.000	252.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	640.000.000	640.000.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	240.000.000	240.000.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	240.000.000	240.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	1.035.764.000	355.599.000	(680.165.000)	66 %
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	1.035.764.000	355.599.000	(680.165.000)	66 %
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	1.035.764.000	355.599.000	(680.165.000)	66 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2.587.498.100	2.472.607.980	(114.890.120)	4 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	2.587.498.100	2.472.607.980	(114.890.120)	4 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	2.587.498.100	2.472.607.980	(114.890.120)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.300.283.730	295.562.732.925	24.262.449.195	9 %
5.1.02.01	Belanja Barang	51.500.603.082	53.870.029.927	2.369.426.845	5 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.268.903.082	53.701.119.927	2.432.216.845	5 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	302.164.950	115.689.650	(186.475.300)	62 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	588.108.280	705.569.280	117.461.000	20 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.436.613.259	2.180.046.158	(1.256.567.101)	37 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	167.265.200	79.275.200	(87.990.000)	53 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.095.105.216	1.080.205.216	(14.900.000)	1 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.000.000	40.600.000	13.600.000	50 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	15.640.000	15.470.000	(170.000)	1 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	110.470.000	108.470.000	(2.000.000)	2 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.188.552.274	4.203.528.264	3.014.975.990	254 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	158.061.500	150.210.500	(7.851.000)	5 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	346.770.000	360.045.000	13.275.000	4 %
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.947.000	1.845.000	(3.102.000)	63 %
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	126.390.000	125.890.000	(500.000)	0 %
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	37.595.000	37.467.500	(127.500)	0 %
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	39.123.000	39.123.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	75.250.000	57.250.000	(18.000.000)	24 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.634.510.976	1.990.741.788	(1.643.769.188)	45 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	874.436.700	898.798.700	24.362.000	3 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.111.879.483	5.914.610.797	(197.268.686)	3 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	171.212.000	161.243.000	(9.969.000)	6 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.256.998.400	1.400.138.300	143.139.900	11 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	861.264.428	1.230.426.548	369.162.120	43 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.069.190.750	1.072.015.625	2.824.875	0 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	712.169.380	844.601.160	132.431.780	19 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	61.778.440	161.770.000	99.991.560	162 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	217.290.000	434.080.000	216.790.000	100 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.125.257.750	1.142.578.012	17.320.262	2 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	685.971.000	802.971.000	117.000.000	17 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.950.000	29.400.000	10.450.000	55 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.127.194.000	9.090.718.541	(1.036.475.459)	10 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0	375.740.000	375.740.000	100 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	233.597.850	213.712.850	(19.885.000)	9 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.736.180.150	10.455.202.650	(1.280.977.500)	11 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.184.765.096	4.190.105.588	2.005.340.492	92 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	294.426.000	260.805.600	(33.620.400)	11 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	75.910.000	683.910.000	608.000.000	801 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	221.975.000	760.185.000	538.210.000	242 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.950.000	5.950.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.000.000	70.000.000	35.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	120.000.000	210.000.000	90.000.000	75 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	148.800.000	148.800.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	423.780.000	301.560.000	(122.220.000)	29 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	35.000.000	70.000.000	35.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	79.000.000	114.000.000	35.000.000	44 %
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	29.850.000	35.025.000	5.175.000	17 %
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	23.500.000	205.990.000	182.490.000	777 %
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	3.825.000	5.670.000	1.845.000	48 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	102.250.000	15.600.000	(86.650.000)	85 %
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	9.900.000	4.900.000	(5.000.000)	51 %
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	4.650.000	4.650.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	72.960.000	42.960.000	(30.000.000)	41 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	167.250.000	308.750.000	141.500.000	85 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	238.375.000	268.025.000	29.650.000	12 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	179.800.000	179.800.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	195.000.000	295.000.000	100.000.000	51 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	231.700.000	168.910.000	(62.790.000)	27 %
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	231.700.000	168.700.000	(63.000.000)	27 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0	210.000	210.000	100 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	129.848.472.916	141.427.495.208	11.579.022.292	9 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	113.058.628.929	127.073.725.332	14.015.096.403	12 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.913.610.000	9.890.770.000	(2.022.840.000)	17 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.714.340.000	2.648.689.000	(6.065.651.000)	70 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	120.500.000	120.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.498.725.000	4.439.950.000	941.225.000	27 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.750.000	7.500.000	750.000	11 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	72.000.000	73.000.000	1.000.000	1 %
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7.340.000	650.000	(6.690.000)	91 %
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	6.800.000	7.200.000	400.000	6 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	309.800.000	484.450.000	174.650.000	56 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	745.400.000	702.600.000	(42.800.000)	6 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.499.536.766	15.598.348.222	5.098.811.456	49 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.280.842.800	1.232.306.972	(48.535.828)	4 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	325.902.599	219.930.820	(105.971.779)	33 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.902.745.709	2.763.529.006	(139.216.703)	5 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.671.281.752	7.365.124.752	1.693.843.000	30 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	957.020.792	957.020.792	0	0 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	883.403.808	883.403.808	0	0 %
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.910.126.504	2.135.174.235	225.047.731	12 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	6.100.000	5.100.000	(1.000.000)	16 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	45.808.492	144.808.492	99.000.000	216 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.769.698.410	3.073.099.273	303.400.863	11 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	500.467.936	548.021.084	47.553.148	10 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.859.034.996	3.171.151.479	312.116.483	11 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.441.039.600	1.370.740.000	(70.299.600)	5 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.950.135.235	17.150.816.751	(799.318.484)	4 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.596.244.072	6.175.109.986	(421.134.086)	6 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	9.580.000	9.580.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	146.350.000	136.225.000	(10.125.000)	7 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	50 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	21.200.000	1.400.000	(19.800.000)	93 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)	67 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000	61.400.000	(38.600.000)	39 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.769.954.000	2.255.264.700	485.310.700	27 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	325.647.000	163.647.000	(162.000.000)	50 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0	55.000.000	55.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	221.049.600	192.049.600	(29.000.000)	13 %

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	145.350.000	1.051.340.000	905.990.000	623 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	86.250.000	58.552.000	(27.698.000)	32 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	636.132.000	981.400.000	345.268.000	54 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	650.625.000	596.750.000	(53.875.000)	8 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	988.705.000	1.055.243.300	66.538.300	7 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.562.170.000	6.571.554.233	9.384.233	0 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.056.570.000	1.104.613.500	48.043.500	5 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.367.120.000	3.156.945.500	(210.174.500)	6 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	53.945.000	17.565.000	(36.380.000)	67 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	835.167.160	377.091.610	(458.075.550)	55 %
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	27.000.000	12.000.000	(15.000.000)	56 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	13.918.129.698	13.310.567.217	(607.562.481)	4 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	118.030.000	148.430.000	30.400.000	26 %
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	0	3.242.757.000	3.242.757.000	100 %
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0	11.315.355.000	11.315.355.000	100 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.199.949.506	5.831.237.482	(368.712.024)	6 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	3.745.156.800	3.109.008.000	(636.148.800)	17 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	0	636.148.800	636.148.800	100 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.211.614.918	1.948.991.904	(262.623.014)	12 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	52.589.784	61.000.270	8.410.486	16 %
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	65.588.004	76.088.508	10.500.504	16 %
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	125.000.000	0	(125.000.000)	100 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	92.000.000	122.500.000	30.500.000	33 %
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	92.000.000	122.500.000	30.500.000	33 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.035.500.000	1.532.515.000	(502.985.000)	25 %
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	20.000.000	0	(20.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	153.700.000	0	(153.700.000)	100 %
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.900.000	0	(15.900.000)	100 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	271.250.000	181.000.000	(90.250.000)	33 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.000.000	17.000.000	2.000.000	13 %
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	41.500.000	29.500.000	(12.000.000)	29 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	197.700.000	38.000.000	(159.700.000)	81 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	614.955.000	311.535.000	(303.420.000)	49 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	234.660.000	564.530.000	329.870.000	141 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	165.235.000	129.450.000	(35.785.000)	22 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	67.000.000	36.500.000	(30.500.000)	46 %
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0	40.000.000	40.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	48.600.000	4.000.000	(44.600.000)	92 %
5.1.02.02.04.0321	Belanja Sewa Alat Peraga Kejuruan	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	89.000.000	93.000.000	4.000.000	4 %
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	80.000.000	65.000.000	(15.000.000)	19 %
5.1.02.02.04.0444	Belanja Sewa Suara	0	2.000.000	2.000.000	100 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.288.150.004	2.587.600.000	299.449.996	13 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	241.250.000	93.900.000	(147.350.000)	61 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.446.850.004	1.511.550.000	64.699.996	4 %
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	31.000.000	0	(31.000.000)	100 %
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.150.000	31.500.000	25.350.000	412 %
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	3.500.000	44.400.000	40.900.000	1.169 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	559.400.000	906.250.000	346.850.000	62 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	34.500.000	19.000.000	(15.500.000)	45 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	34.500.000	19.000.000	(15.500.000)	45 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.235.520.000	805.260.000	(430.260.000)	35 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	452.000.000	107.660.000	(344.340.000)	76 %
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	145.200.000	25.000.000	(120.200.000)	83 %
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	195.820.000	195.820.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	70.000.000	70.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	32.500.000	126.780.000	94.280.000	290 %
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	225.000.000	205.000.000	(20.000.000)	9 %
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	90.000.000	50.000.000	(40.000.000)	44 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.114.510.684	1.582.433.000	(532.077.684)	25 %
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	348.000.000	0	(348.000.000)	100 %
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	212.924.084	140.500.000	(72.424.084)	34 %
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0	180.000.000	180.000.000	100 %
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	447.386.600	203.595.000	(243.791.600)	54 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	476.750.000	406.638.000	(70.112.000)	15 %
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	629.450.000	481.700.000	(147.750.000)	23 %
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataaan	0	70.000.000	70.000.000	100 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	222.000.000	164.000.000	(58.000.000)	26 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	90.000.000	86.000.000	(4.000.000)	4 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	132.000.000	78.000.000	(54.000.000)	41 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.972.038.000	1.216.586.000	(755.452.000)	38 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.778.766.000	1.216.586.000	(562.180.000)	32 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	193.272.000	0	(193.272.000)	100 %
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	217.118.266	217.118.266	0	0 %
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	68.139.689	68.139.689	0	0 %
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	31.617.578	31.617.578	0	0 %
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.895.590	4.895.590	0	0 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.225.741	6.225.741	0	0 %
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	26.860.081	26.860.081	0	0 %
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.423.703	2.423.703	0	0 %
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	487.881	487.881	0	0 %
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.227.204	20.227.204	0	0 %
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.240.799	56.240.799	0	0 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	378.557.527	275.520.128	(103.037.399)	27 %
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.633.407	22.200.545	(2.432.862)	10 %
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.365.000	13.365.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.761.601	8.367.845	(1.393.756)	14 %
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	130.000	130.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	16.105.168	15.622.324	(482.844)	3 %
5.1.02.02.14.0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000	600.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	46.277.395	25.811.047	(20.466.348)	44 %
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	991.516	991.516	0	0 %
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	50.200.888	38.431.851	(11.769.037)	23 %
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	216.492.552	140.000.000	(76.492.552)	35 %
5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.411.731.392	21.653.863.867	2.242.132.475	12 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	22.530.000	22.530.000	0	0 %
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	22.530.000	22.530.000	0	0 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.703.006.849	14.391.927.012	1.688.920.163	13 %
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	134.000.000	124.000.000	(10.000.000)	7 %
5.1.02.03.02.0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	253.191.240	370.886.730	117.695.490	46 %
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	485.345.000	242.672.500	(242.672.500)	50 %
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	18.000.000	10.000.000	(8.000.000)	44 %

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	282.672.500	272.672.500	(10.000.000)	4 %
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.750.000	11.390.000	8.640.000	314 %
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	507.887.109	212.655.000	(295.232.109)	58 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.327.500.000	2.995.586.890	668.086.890	29 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	396.610.000	641.500.000	244.890.000	62 %
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.045.222.000	4.375.800.000	330.578.000	8 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	876.250.000	1.180.400.000	304.150.000	35 %
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.651.622.500	1.635.541.500	(16.081.000)	1 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	336.469.000	502.468.000	165.999.000	49 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	270.000.000	322.000.000	52.000.000	19 %
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	22.052.500	22.052.500	0	0 %
5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	500.000	500.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	6.710.000	6.710.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	452.110.000	446.480.000	(5.630.000)	1 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	29.550.000	71.800.000	42.250.000	143 %
5.1.02.03.02.0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.910.000	57.900.000	8.990.000	18 %
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	193.480.000	272.790.000	79.310.000	41 %
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.500.000	2.500.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	1.900.000	1.900.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	14.000.000	11.200.000	(2.800.000)	20 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	140.065.000	160.735.000	20.670.000	15 %
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	62.480.000	138.810.000	76.330.000	122 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	17.070.000	19.140.000	2.070.000	12 %
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	80.000.000	15.676.392	(64.323.608)	80 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	4.050.000	11.250.000	7.200.000	178 %
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	6.050.000	12.450.000	6.400.000	106 %
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	750.000	750.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR- Alat Penolong	1.310.000	1.310.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0	203.400.000	203.400.000	100 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.921.325.058	1.851.574.220	(69.750.838)	4 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.219.282.270	833.386.432	(385.895.838)	32 %
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	111.073.100	118.513.100	7.440.000	7 %
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0	84.000.000	84.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	145.000.000	145.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	151.000.000	100.000.000	(51.000.000)	34 %
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	115.795.000	6.500.000	(109.295.000)	94 %
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	117.675.000	297.675.000	180.000.000	153 %
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	100.000.000	90.000.000	(10.000.000)	10 %
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	6.499.688	6.499.688	0	0 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.499.369.485	2.932.332.635	432.963.150	17 %
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	819.225.978	819.225.978	0	0 %
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	327.658.485	527.658.485	200.000.000	61 %
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	219.000.000	219.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	358.498.172	558.498.172	200.000.000	56 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	0	0	0 %
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	13.500.000	3.300.000	(10.200.000)	76 %
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	82.000.000	82.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	106.486.850	0	(106.486.850)	100 %
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)	33 %
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	56.000.000	61.000.000	5.000.000	9 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	447.000.000	611.650.000	164.650.000	37 %
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.265.500.000	2.455.500.000	190.000.000	8 %
5.1.02.03.05.0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang	2.215.000.000	2.405.000.000	190.000.000	9 %
5.1.02.03.05.0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	500.000	500.000	0	0 %
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.129.120.025	42.803.639.673	(2.325.480.352)	5 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.949.120.025	42.268.639.673	(2.680.480.352)	6 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.002.025.294	38.526.277.164	4.524.251.870	13 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.276.882.731	1.801.144.509	(6.475.738.222)	78 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.494.570.000	1.703.920.000	209.350.000	14 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.175.642.000	237.298.000	(938.344.000)	80 %
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	180.000.000	535.000.000	355.000.000	197 %
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	180.000.000	535.000.000	355.000.000	197 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.756.450.000	2.758.900.000	1.002.450.000	57 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.749.450.000	2.159.900.000	410.450.000	23 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.528.800.000	946.000.000	(582.800.000)	38 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	64.750.000	341.900.000	277.150.000	428 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	155.900.000	27.000.000	(128.900.000)	83 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0	845.000.000	845.000.000	100 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000	599.000.000	592.000.000	8.457 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000	463.000.000	458.000.000	9.160 %
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.000.000	136.000.000	134.000.000	6.700 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.277.448.300	13.161.820.071	1.884.371.771	17 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.277.448.300	13.161.820.071	1.884.371.771	17 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.277.448.300	13.161.820.071	1.884.371.771	17 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.365.708.015	19.886.984.179	7.521.276.164	61 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.365.708.015	19.886.984.179	7.521.276.164	61 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.365.708.015	19.886.984.179	7.521.276.164	61 %
5.1.05	Belanja Hibah	25.022.748.026	23.655.237.526	(1.367.510.500)	5 %
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0	355.379.000	355.379.000	100 %
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	305.379.000	305.379.000	100 %

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	305.379.000	305.379.000	100 %
5.1.05.01.03	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.05.01.03.0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.287.100.500	22.564.211.000	(1.722.889.500)	7 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.508.472.500	6.861.740.500	(2.646.732.000)	28 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.278.472.500	6.576.740.500	(2.701.732.000)	29 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	230.000.000	285.000.000	55.000.000	24 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.213.628.000	15.487.470.500	1.273.842.500	9 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.016.628.000	14.245.470.500	1.228.842.500	9 %
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.197.000.000	1.242.000.000	45.000.000	4 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	565.000.000	215.000.000	(350.000.000)	62 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	475.000.000	125.000.000	(350.000.000)	74 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526	735.647.526	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526	735.647.526	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526	735.647.526	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.690.800.000	1.080.000.000	(610.800.000)	36 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.800.000	0	(100.800.000)	100 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.800.000	0	(100.800.000)	100 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.800.000	0	(100.800.000)	100 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.540.000.000	1.080.000.000	(460.000.000)	30 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.540.000.000	1.080.000.000	(460.000.000)	30 %
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.540.000.000	1.080.000.000	(460.000.000)	30 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.2	BELANJA MODAL	145.005.506.124	123.125.748.792	(21.879.757.332)	15 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.085.739.500	0	(4.085.739.500)	100 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	4.085.739.500	0	(4.085.739.500)	100 %

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.085.739.500	0	(4.085.739.500)	100 %
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	4.085.739.500	0	(4.085.739.500)	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.046.579.223	49.999.944.467	10.953.365.244	28 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	255.760.000	520.700.000	264.940.000	104 %
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	93.000.000	113.000.000	20.000.000	22 %
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	93.000.000	93.000.000	0	0 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	162.760.000	407.700.000	244.940.000	150 %
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	4.500.000	4.500.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0	370.000.000	370.000.000	100 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	156.260.000	31.200.000	(125.060.000)	80 %
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.876.426.800	6.001.727.000	(1.874.699.800)	24 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.720.426.800	5.834.827.000	(1.885.599.800)	24 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.143.750.000	0	(2.143.750.000)	100 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.276.790.200	2.186.240.000	(90.550.200)	4 %
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	241.566.600	2.656.848.000	2.415.281.400	1.000 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	158.320.000	411.739.000	253.419.000	160 %
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.400.000.000	80.000.000	(2.320.000.000)	97 %
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	156.000.000	166.900.000	10.900.000	7 %
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.000.000	5.900.000	900.000	18 %
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0	60.000.000	60.000.000	100 %
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	151.000.000	101.000.000	(50.000.000)	33 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	620.211.320	338.111.320	(282.100.000)	45 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	511.450.000	5.500.000	(505.950.000)	99 %
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2.750.000	1.500.000	(1.250.000)	45 %
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	4.000.000	4.000.000	0	0 %
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.700.000	0	(4.700.000)	100 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.737.400	20.137.400	9.400.000	88 %
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0	4.400.000	4.400.000	100 %
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	10.737.400	10.737.400	0	0 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	98.023.920	312.473.920	214.450.000	219 %
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	31.647.920	244.197.920	212.550.000	672 %
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.500.000	12.000.000	10.500.000	700 %
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	5.000.000	0	(5.000.000)	100 %
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	58.376.000	54.776.000	(3.600.000)	6 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.250.000	5.250.000	0	0 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.250.000	5.250.000	0	0 %
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	250.000	250.000	0	0 %
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.797.511.320	11.011.771.810	1.214.260.490	12 %

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.528.248.000	1.700.012.620	171.764.620	11 %
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	7.000.000	7.000.000	0	0 %
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	700.000	700.000	0	0 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.871.000	180.871.000	152.000.000	526 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.491.677.000	1.511.441.620	19.764.620	1 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.978.633.320	8.873.629.190	894.995.870	11 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.997.100.000	4.467.093.800	(1.530.006.200)	26 %
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.824.000	1.824.000	0	0 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	75.000.000	86.500.000	11.500.000	15 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	196.050.000	196.050.000	100 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.995.600	172.295.600	169.300.000	5.652 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.445.290.600	3.829.505.070	2.384.214.470	165 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	456.423.120	120.360.720	(336.062.400)	74 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	290.630.000	438.130.000	147.500.000	51 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.950.000	123.900.000	117.950.000	1.982 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.950.000	53.600.000	39.650.000	284 %
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	50.000.000	51.900.000	1.900.000	4 %
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	99.730.000	70.480.000	(29.250.000)	29 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	121.000.000	138.250.000	17.250.000	14 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	741.034.000	1.624.788.000	883.754.000	119 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	730.034.000	1.263.538.000	533.504.000	73 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	648.197.000	1.118.390.000	470.193.000	73 %
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0	33.200.000	33.200.000	100 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	81.837.000	111.948.000	30.111.000	37 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.000.000	361.250.000	350.250.000	3.184 %
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0	309.000.000	309.000.000	100 %
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	6.000.000	0	(6.000.000)	100 %
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.000.000	52.250.000	47.250.000	945 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	228.185.000	235.660.000	7.475.000	3 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	228.185.000	235.660.000	7.475.000	3 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	39.060.000	47.060.000	8.000.000	20 %
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0	0	0	0 %
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0	0	0	0 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	189.125.000	188.600.000	(525.000)	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0	0	0 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	0	0	0 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.528.173.425	3.385.038.625	(143.134.800)	4 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.838.188.000	2.838.188.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	3.280.000	3.280.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0	0	0	0 %
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0	0	0	0 %
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	3.645.000	3.645.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.830.263.000	2.830.263.000	0	0 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	192.120.000	74.200.000	(117.920.000)	61 %
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	192.120.000	74.200.000	(117.920.000)	61 %
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	497.865.425	472.650.625	(25.214.800)	5 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	497.865.425	472.650.625	(25.214.800)	5 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.250.067.500	6.546.952.700	3.296.885.200	101 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.051.617.000	5.241.595.000	3.189.978.000	155 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	135.000.000	135.200.000	200.000	0 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	877.026.000	3.340.284.000	2.463.258.000	281 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.039.591.000	1.766.111.000	726.520.000	70 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.198.450.500	1.305.357.700	106.907.200	9 %
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0	22.238.000	22.238.000	100 %
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	14.500.000	14.500.000	100 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	66.940.000	496.401.000	429.461.000	642 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	514.000.000	107.000.000	(407.000.000)	79 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	617.510.500	665.218.700	47.708.200	8 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.500.000	0	(1.500.000)	100 %
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	1.500.000	0	(1.500.000)	100 %
5.2.02.13.02.0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	1.500.000	0	(1.500.000)	100 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	66.700.000	98.857.500	32.157.500	48 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	35.700.000	12.500.000	(23.200.000)	65 %
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	5.700.000	4.500.000	(1.200.000)	21 %
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	12.600.000	0	(12.600.000)	100 %
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	17.400.000	8.000.000	(9.400.000)	54 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	31.000.000	86.357.500	55.357.500	179 %
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	31.000.000	86.357.500	55.357.500	179 %
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.346.800.000	4.016.000.000	2.669.200.000	198 %
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.346.800.000	4.016.000.000	2.669.200.000	198 %
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	1.346.800.000	4.016.000.000	2.669.200.000	198 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	59.500.000	271.350.000	211.850.000	356 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	59.500.000	271.350.000	211.850.000	356 %
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	32.000.000	243.850.000	211.850.000	662 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	27.500.000	27.500.000	0	0 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.000.000	100.000.000	89.000.000	809 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.000.000	100.000.000	89.000.000	809 %
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	1.800.000	0	(1.800.000)	100 %
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	9.200.000	50.000.000	40.800.000	443 %
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0	0	0	0 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.869.239.700	4.086.445.997	2.217.206.297	119 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.869.239.700	4.086.445.997	2.217.206.297	119 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.869.239.700	4.086.445.997	2.217.206.297	119 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.389.220.158	11.757.291.515	2.368.071.357	25 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.389.220.158	11.757.291.515	2.368.071.357	25 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.389.220.158	11.757.291.515	2.368.071.357	25 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.112.152.940	29.277.125.124	(16.835.027.816)	37 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.286.718.940	28.476.691.124	(16.810.027.816)	37 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.086.718.940	28.476.691.124	(16.610.027.816)	37 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.455.280.758	10.936.624.568	(3.518.656.190)	24 %
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	465.670.000	477.080.000	11.410.000	2 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.397.200.000	250.000.000	(1.147.200.000)	82 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.744.260.000	11.426.751.274	(10.317.508.726)	47 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	187.800.000	21.000.000	(166.800.000)	89 %
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0	0	0	0 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	228.000.000	328.000.000	100.000.000	44 %
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	5.248.804.000	3.559.331.100	(1.689.472.900)	32 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	213.000.000	100.000.000	(113.000.000)	53 %
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	627.579.658	622.579.658	(5.000.000)	1 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	319.124.524	555.324.524	236.200.000	74 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0	0	0	0 %
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	77.500.000	77.500.000	0	0 %
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	77.500.000	77.500.000	0	0 %
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	77.500.000	77.500.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	657.934.000	657.934.000	0	0 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	657.934.000	657.934.000	0	0 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	457.934.000	457.934.000	0	0 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	90.000.000	65.000.000	(25.000.000)	28 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	90.000.000	65.000.000	(25.000.000)	28 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	90.000.000	65.000.000	(25.000.000)	28 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.441.313.461	40.886.820.001	(12.554.493.460)	23 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.582.852.000	12.658.209.413	(9.924.642.587)	44 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	21.962.602.000	12.058.209.413	(9.904.392.587)	45 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	11.094.937.000	7.489.330.000	(3.605.607.000)	32 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	10.867.665.000	4.568.879.413	(6.298.785.587)	58 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	620.250.000	600.000.000	(20.250.000)	3 %
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	620.250.000	600.000.000	(20.250.000)	3 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.781.363.150	23.070.012.277	(2.711.350.873)	11 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.456.390.000	2.304.031.500	(1.152.358.500)	33 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.456.390.000	2.304.031.500	(1.152.358.500)	33 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.944.115.650	3.944.115.650	0	0 %
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.944.115.650	3.944.115.650	0	0 %
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	18.380.857.500	16.821.865.127	(1.558.992.373)	8 %
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	18.380.857.500	16.821.865.127	(1.558.992.373)	8 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.799.913.311	4.881.413.311	81.500.000	2 %
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.956.162.793	4.037.662.793	81.500.000	2 %
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	3.330.882.000	3.412.382.000	81.500.000	2 %
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	625.280.793	625.280.793	0	0 %
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	843.750.518	843.750.518	0	0 %
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0	0	0	0 %
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	843.750.518	843.750.518	0	0 %

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	277.185.000	277.185.000	0	0 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	52.185.000	52.185.000	0	0 %
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	52.185.000	52.185.000	0	0 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	225.000.000	225.000.000	0	0 %
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	212.000.000	212.000.000	0	0 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	13.000.000	13.000.000	0	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.214.721.000	2.961.859.200	747.138.200	34 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	318.235.000	441.000.000	122.765.000	39 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	116.235.000	31.000.000	(85.235.000)	73 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	37.000.000	31.000.000	(6.000.000)	16 %
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	79.235.000	0	(79.235.000)	100 %
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	202.000.000	410.000.000	208.000.000	103 %
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	202.000.000	407.000.000	205.000.000	101 %
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	807.238.000	878.720.000	71.482.000	9 %
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	787.238.000	878.720.000	91.482.000	12 %
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0	30.000.000	30.000.000	100 %
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	787.238.000	848.720.000	61.482.000	8 %
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	20.000.000	0	(20.000.000)	100 %
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	20.000.000	0	(20.000.000)	100 %
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	200.000.000	50.000.000	(150.000.000)	75 %
5.2.05.03.01	Belanja Modal Hewan Piaraan	200.000.000	50.000.000	(150.000.000)	75 %
5.2.05.03.01.0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang	200.000.000	50.000.000	(150.000.000)	75 %
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	1.200.000	1.200.000	0	0 %
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	1.200.000	1.200.000	0	0 %
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	1.200.000	1.200.000	0	0 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	638.048.000	1.590.939.200	952.891.200	149 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	638.048.000	1.590.939.200	952.891.200	149 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	638.048.000	1.590.939.200	952.891.200	149 %
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000	0	(250.000.000)	100 %
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000	0	(250.000.000)	100 %
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000	0	(250.000.000)	100 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000	0	(105.000.000)	100 %
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	105.000.000	0	(105.000.000)	100 %
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	105.000.000	0	(105.000.000)	100 %
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	105.000.000	0	(105.000.000)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	17.671.485.436	7.671.485.436	77 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	17.671.485.436	7.671.485.436	77 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	17.671.485.436	7.671.485.436	77 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	17.671.485.436	7.671.485.436	77 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	17.671.485.436	7.671.485.436	77 %
	Jumlah Belanja	785.380.370.094	783.759.843.834	(1.620.526.260)	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(53.247.529.327)	(99.412.782.688)	(46.165.253.361)	-87 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.247.529.327	99.412.782.688	46.165.253.361	87 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.247.529.327	99.386.026.235	46.138.496.908	87 %

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 35 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Oktober 2021

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0 %
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0	0	0	0 %
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	0	0	0	0 %
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	13.902.477.675	0	(13.902.477.675)	100 %
6.1.01.04.01	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	13.902.477.675	0	(13.902.477.675)	100 %
6.1.01.04.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	13.902.477.675	0	(13.902.477.675)	100 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	39.345.051.652	99.386.026.235	60.040.974.583	153 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	18.513.748.682	56.627.376.900	38.113.628.218	206 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000.000	15.645.243.423	12.645.243.423	422 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.000.000.000	34.936.799.487	24.936.799.487	249 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	4.006.093.729	0	(4.006.093.729)	100 %
6.1.01.05.01.0020	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	0	4.522.359.854	4.522.359.854	100 %
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.507.654.953	1.522.974.136	15.319.183	1 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.831.302.970	25.415.651.640	4.584.348.670	22 %
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	13.664.536.322	25.415.651.640	11.751.115.318	86 %
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	939.340.788	0	(939.340.788)	100 %
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	6.227.425.860	0	(6.227.425.860)	100 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0	17.342.997.696	17.342.997.696	100 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0	17.342.997.696	17.342.997.696	100 %
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	26.756.453	26.756.453	100 %
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	0	26.756.453	26.756.453	100 %
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	0	26.756.453	26.756.453	100 %
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	0	26.756.453	26.756.453	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	53.247.529.327	99.412.782.688	46.165.253.361	87 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	0	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	53.247.529.327	99.412.782.688	46.165.253.361	87 %

Walikota Bukittinggi



ERMAN SAFAR